

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN POPULASI TERHADAP PENGELUARAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Syaikhy Rahman Helmi

Nomor Mahasiswa : 20313411

Program Studi : Ekonomi Pembanguna

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DANa POPULASI TERHADAP PENGELUARAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013-2023**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembanguna
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Syaikhy Rahman Helmi
Nomor Mahasiswa : 20313411
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saya ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan tugas akhir Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2025



Syaikhy Rahman Helmi

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023

Nama : Syaikhy Rahman Helmi
Nomor Mahasiswa : 20313411
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



M. Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023

Disusun oleh : SYAIKHY RAHMAN HELMI

Nomor Mahasiswa : 20313411

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 16 April 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Listya Endang Artiani, SE.,M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, di halaman persembahan ini saya mengucapkan syukur atas segala puja dan puji atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam dan satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan ridho-Nya setiap langkah saya baik dalam penulisan skripsi ini maupun diluar selalu diberikan jalan yang terang agar dalam hidup di dunia ini selalu ingat kepada-Nya. Tidak lupa shalawat untuk Rasul Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir dan pemberi syafaat kelak di hari akhirat nanti serta tidak lupa menjadi contoh umat manusia dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Persembahan ini saya buat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah semata tanpa dan menjadi amal jariyah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas izin Allah, skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023” telah dilaksanakan sebagai tugas akhir. Tentu tidak boleh lupa saya berterima kasih kepada orang-orang yang mengiringi selama saya membuat tugas akhir ini. Terima kasih kepada:

1. Yang pertama, yakni yang saya hormati bapak dosen pembimbing saya M.Bekti Hendrie Anto, S.E., M.Sc yang telah membimbing saya dengan kasih sayang, waktu, tenaga, pikiran, emosional, spiritual, dan fisik sehingga saya bisa menuntaskan tugas akhir ini dengan hebat.
2. Yang kedua, yakni yang saya hormati, Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dekan fakultas fakultas bisnis dan ekonomika UII, Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. Selaku ketua jurusan ilmu ekonomi UII, dan Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku kepala program studi ilmu ekonomi UII.
3. Yang ketiga, yakni yang paling saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mengingatkan, mendoakan, mendukung dan hal baik lainnya kepada saya. Saya benar-benar beruntung mempunyai orang tua seperti mereka yang selalu percaya kepada anak seperti saya. Saya dengan ikhlas LILLAHJI TA'ALA skripsi ini saya niatkan untuk kebaikan orang tua saya selama di dunia maupun di akhirat.
4. Yang keempat, teman-teman saya yang saya hormati, yakni teman satu rumah Adib, Dean, Novan, Anam, Desta, Rohit dan Iwang yang membantu saya dalam pengerjaan tugas akhir dengan memberi semangat dan masukan yang membuat saya termotivasi.
5. Yang kelima, yang saya hormati, yakni uni saya Yalida Aulia dan suami beserta anak-anaknya yang selalu menerima saya dengan hangat dan mendukung keputusan yang saya ambil.
6. Yang keenam, yang saya hormati, yakni semua keluarga jauh saya yang pastinya selalu mengharapkan yang terbaik dan menghargai apapun keputusan yang saya ambil.

7. Yang ketujuh, yang saya hormati, yakni keluarga Asrama Mahasiswa Merapi Singgalang yang turut berkontribusi dalam perjalanan saya membuat skripsi ini.
8. Yang kedelapan, yang saya hormati, semua dosen maupun perangkat lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang mengajarkan saya arti sebuah kehidupan.
9. Yang kesembilan, yang saya hormati, sanak-sanak saya yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Yang terakhir, yang saya hormati, yakni teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tentu, dalam penulisan skripsi ini masih terasa ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga dimohonkan agar memberikan perbaikan berupa kritik dan saran. Semua yang ada pada skripsi ini, tolong dijadikan pembelajaran agar nanti kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki. Saya meminta maaf seluas-luasnya dan skripsi ini bisa membantu di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Penulis,

Syaikhly Rahman Helmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
BAB II.....	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Pengeluaran Pemerintah	12
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.2.3. Dana Perimbangan.....	17
2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto.....	18
2.2.5. Populasi	19
2.3. Hubungan antar Variabel	19
2.3.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pengeluaran Pemerintah	19
2.3.2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pengeluaran Pemerintah	20
2.3.3. Hubungan PDRB dengan Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.3.4. Hubungan Populasi dengan Pengeluaran Pemerintah	20
2.4. Kerangka Pemikiran	21
2.5. Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III	23
3.1 Jenis dan Sumber Data	23

3.2 Definisi Operasional Variabel	23
3.2.1 Variabel Dependen	23
3.2.2 Variabel Independen	24
3.3 Metode Analisis Data	25
3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel	26
3.4 Pemilihan Model	27
3.4.1 Uji <i>Chow</i>	27
3.4.2 Uji <i>Hausman</i>	28
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier	29
3.5. Pengujian Statistik	30
3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)	30
3.5.2 Uji F	30
3.5.3 Uji t	31
BAB IV	32
4.1 Deskripsi Data Penelitian	32
4.2 Hasil Pengolahan Data	33
4.2.1 <i>Common Effect Model</i>	33
4.2.2 <i>Fixed Effect Model</i>	33
4.2.3 <i>Random Effect Model</i>	34
4.2.4 Uji <i>Chow</i>	35
4.2.5 Uji <i>Hausman</i>	35
4.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	37
4.2.7 Uji Simultan (uji F)	37
4.2.8 Uji Parsial (uji t)	38
4.3 Pembahasan	39
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah	39
4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah	40
4.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap pengeluaran Pemerintah	41
4.3.4 Pengaruh Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah	41
BAB V	43
5.1. Kesimpulan	43
5.2 Implikasi	43

Daftar Pustaka	45
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Dekriptif.....	32
Tabel 4. 2 Common Effect Model.....	33
Tabel 4. 3 Fixed Effect Model.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Random Effect Model	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Uji Chow	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Uji Hausman	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Model Terbaik Fixed Effect Model	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Uji F	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 10 Uji t.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia.....	3
Gambar 1 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat	4
Gambar 1 3 Perkembangan PAD Sumatera Barat.....	5
Gambar 1 4 Perkembangan DP Sumatera Barat.....	6
Gambar 1 5 Perkembangan PDRB Sumatera Barat.....	7
Gambar 1 6 Perkembangan Populasi Sumatera Barat	7
Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	48
Lampiran 2 Common Effect Model.....	56
Lampiran 3 Fixed Effect Model.....	57
Lampiran 4 Random Effect Model.....	58
Lampiran 5 Uji Chow.....	58
Lampiran 6 Uji Hausman.....	58

ABSTRAK

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang mengalami peningkatan Pengeluaran Pemerintah berdasarkan penelitian ini yaitu dari tahun 2013 sampai 2023. Tren peningkatan itu membuat Sumatera Barat berhasil mengurangi ketergantungan akan pemerintah pusat. Namun, meskipun demikian, Sumatera Barat masih mempunyai pekerjaan rumah yang banyak yang perlu diatasi. Misalnya dalam penelitian ini mengambil masalah ketimpangan antar kabupaten dan kota. Penelitian ini dibuat untuk melihat dan menganalisis Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Populasi. Penelitian ini memakai data sekunder yang telah tersedia di website pemerintahan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini memakai metode data panel dengan model terbaiknya adalah *Fixed Effect Model*. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh dari variabel bebas, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Populasi terhadap variabel terikat, yaitu Pengeluaran Pemerintah. Hasil yang didapati adalah variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023, variabel Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023, variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023, dan Populasi yang tidak mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023. Adapun uji F, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023.

Kata Kunci: PAD, Dana Perimbangan, PDRB, Populasi, dan Pengeluaran Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwasanya pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan juga bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut membuat pemerintahan daerah diberikan hak otonom untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Dalam melaksanakan tugas otonomi daerah, pemerintah daerah tidak sendirian dalam mengemudikannya. Ada fungsi-fungsi yang sudah diterapkan di pemerintahan pusat, seperti fungsi eksekutif (Presiden), fungsi legislatif (DPR), dan fungsi yudikatif (Pengadilan). Tiga fungsi tersebut juga diturunkan ke pemerintahan daerah guna mempermudah aliran komunikasi, seperti fungsi eksekutif (Gubernur), fungsi legislatif (DPRD), dan fungsi yudikatif (Pengadilan). Tiga fungsi memperlihatkan keseriusan pemerintahan pusat memberikan mandat kepada daerah supaya bisa memaksimalkan tiga fungsi tersebut untuk pemerataan pembangunan. Adapun juga Undang-Undang yang mengatur tentang pemisahan fungsi legislatif dan eksekutif di daerah yang tertuang dalam Undang-Undang 32 tahun 2004.

Pemberian otonomi daerah sendiri merupakan tujuan dari sebuah kebijakan yang bernama desentralisasi. Adanya kebijakan desentralisasi ini membuat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mempunyai hubungan dalam membangun pemerataan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi ini bisa nantinya menjadi kaki tangan pemerintahan pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan untuk setiap daerah. Pemerintah daerah dalam menerapkan desentralisasi ini penting memiliki kemampuan

dalam mengelola keuangannya. Keuangan pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan. Beberapa sumber keuangan daerah tersebut merupakan partisipasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan untuk mengabdikan ke masyarakat.

Dalam menyelesaikan masalah yang ada di daerah masing-masing, tentu pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalahnya tanpa bergantung banyak kepada pemerintah pusat. Penyelesaian masalah secara finansial membutuhkan dana yang banyak dari APBD contohnya. APBD sendiri merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai wujud pemenuhan kewajiban kepada masyarakat dengan menganggarkan dan merealisasikan keuangan yang dimiliki. Meskipun pemerintah daerah punya sumber keuangan sendiri tetapi pemerintah pusat tidak begitu saja lepas tangan. Pemerintah pusat menyokong pemerintah daerah dengan Dana Perimbangan supaya pemerintah daerah merasa dirinya tidak sendiri dalam menyelesaikan masalah.

Dalam dana transfer dari pusat ke daerah memiliki dampak sisi positif dan sisi negatif (Adi, 2012). Pemerintah daerah harus mengambil sisi positif dari kebijakan pemberian tersebut dan membuang sisi negatifnya. Pemerintah daerah wajib melakukan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan berapa jumlahnya dengan tepat. Pemerintah daerah tidak boleh melakukan penyelewengan kekuasaan anggaran karena bisa membuat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta masyarakat bisa mengalami masalah. Apabila sisi negatifnya tetap diambil oleh pemerintah daerah maka tujuan dari desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat bisa gagal dan membuat pemerintah pusat mencabut hak daerah untuk mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah harus sadar tugasnya adalah sebagai pelayan masyarakat.

Pemenuhan akan berbagai pengadaan pelayanan umum dan pengalokasian anggaran yang tepat ini disebut dengan Pengeluaran Pemerintah. Pengeluaran Pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam mendanai segala bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Adapun Pengeluaran Pemerintah daerah bisa menjadi standar atau hal mendasar kesuksesan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Pengeluaran pemerintah daerah mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB, dan populasi.



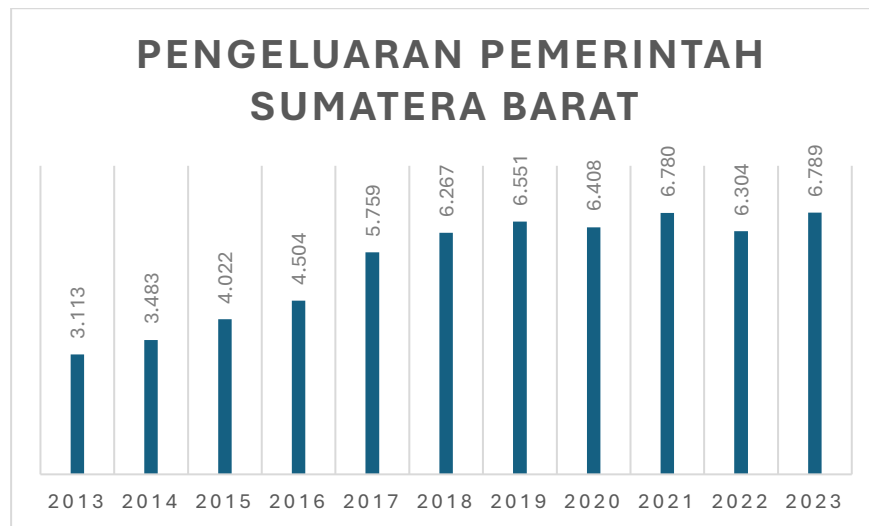
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2023)

Gambar 1.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia

Melihat Indonesia sekarang yang memiliki provinsi sebanyak 38 provinsi yang semula 34 provinsi. Hal ini jelas menimbulkan total kenaikan Pengeluaran Pemerintah daerah di Indonesia. Pada gambar 1.1 di atas bisa dilihat bahwa tingkat total Pengeluaran Pemerintah daerah yang ada di Indonesia selalu mengalami peningkatan pengeluaran dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Namun, setelah tahun 2019 terjadi fluktuasi pengeluaran akibat dari tekanan pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran Pengeluaran Pemerintah sehingga percepatan pembangunan menjadi lambat. Setelah benar-benar lepas dari Covid-19, pada tahun 2023 dapat dilihat terjadi percepatan pembangunan atau kenaikan Pengeluaran Pemerintah yang terakhir kali mengalami pengeluaran paling tinggi di tahun 2019.

Melihat Pengeluaran Pemerintah yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, pemerintah daerah diharapkan bisa menyesuaikan anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasinya. Pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relatif kurang produktif, tetapi mengalokasikan belanja yang mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai sektor. Dengan semakin meningkatnya belanja maka akan

dibutuhkan dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi (Sorongan, 2013). Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengadaan pelayanan umum menjadi tantangan yang mesti diselesaikan dan melihat bagaimana pengalokasian anggaran yang semula kurang maksimal menjadi maksimal sebagai bentuk pengabdian kepada rakyatnya.

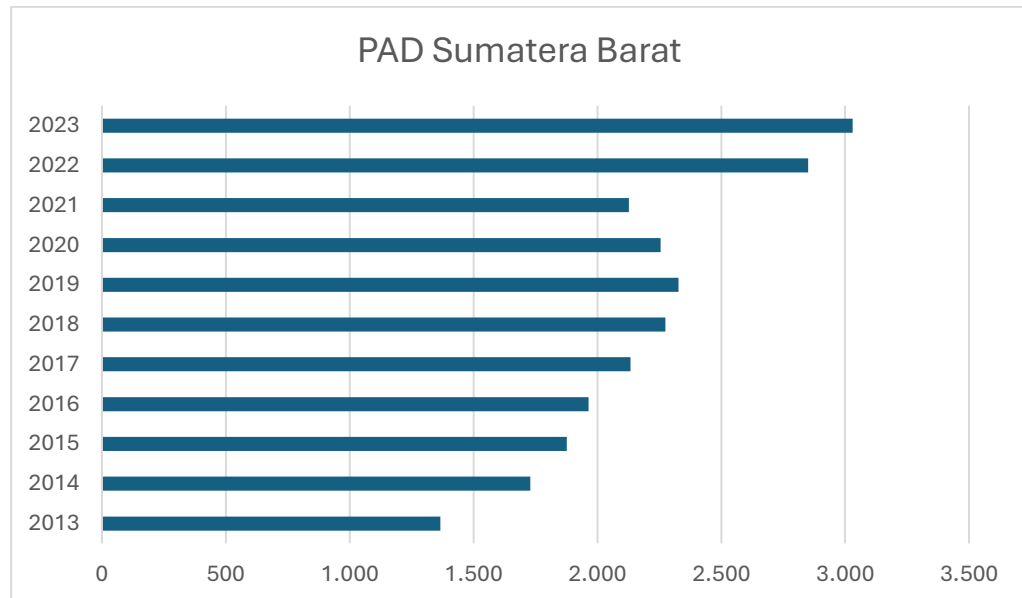


(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2023)

Gambar 1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat

Dilihat dari gambar 1.2 di atas, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan provinsi yang Pengeluaran Pemerintah daerahnya selalu naik dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020, 2021, dan 2022 yang mengalami fluktuatif akibat pandemi Covid-19. Selama periode tersebut, Provinsi Sumatera Barat terus memperlihatkan perkembangan Pengeluaran Pemerintah yang grafiknya selalu naik. Naiknya Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang bersangkutan. Namun sebaliknya, peningkatan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini justru memicu adanya masalah yang perlu diselesaikan. Di mana 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat masih mengalami ketimpangan antar daerah meskipun pengeluaran antar kabupaten dan kota selalu naik tiap tahunnya. Dimulai dari yang paling atas Pengeluaran Pemerintahnya, yaitu Kota Padang sampai ke yang paling bawah, yaitu Kota Padang Panjang. Masalah ketimpangan antar daerah ini menjadi menarik untuk

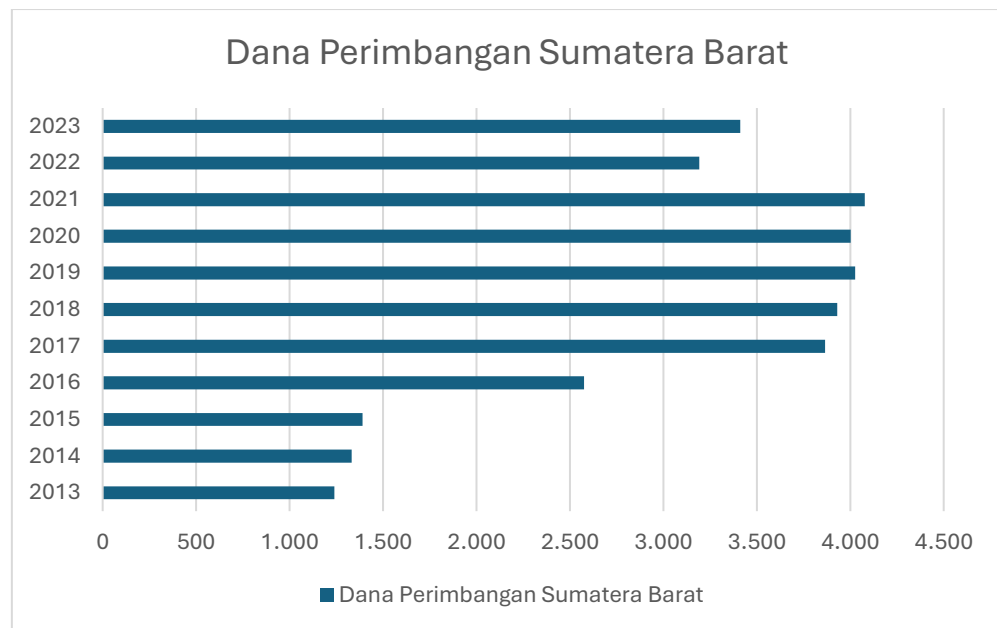
diteliti karena terjadi saat pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan kondisi Pengeluaran Pemerintah yang selalu naik.



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2023)

Gambar 1.3 Perkembangan PAD Sumatera Barat

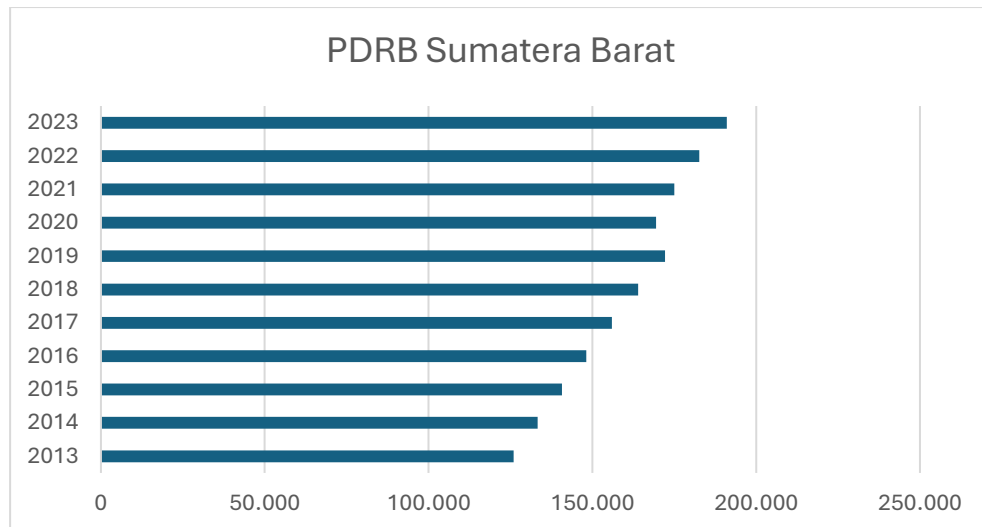
Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang dihasilkan oleh berbagai upaya pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana kebutuhan daerah, seperti mendukung kegiatan rutin dan pembangunan (Handayani dan Suryati, 2022). Berdasarkan dari gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwasanya PAD Sumatera Barat mengalami tren kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2023 meski tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami tren penurunan akibat pandemi Covid-19. Kenaikan PAD ini memberitahu pemerintah daerah Sumatera Barat akan perbaikan terhadap pengelolaan sumber daya daerah.



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2023)

Gambar 1.4 Perkembangan DP Sumatera Barat

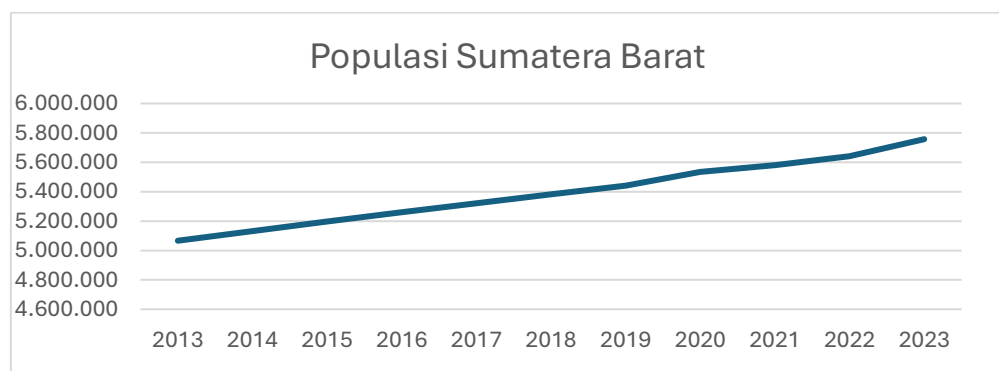
Dalam operasional belanja, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah untuk menjadikan satu-satunya sumber keuangan daerah tetapi juga mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Dana Perimbangan sendiri merupakan dana yang diberi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna menutup kesenjangan dan pemerataan fiskal di setiap daerah dalam rangka menolong dan menjaga kemandirian pemerintah daerah supaya dapat menjalankan fungsi kemasyarakatan (Yovita Wawo dan Endah Sulistyowati, 2022). Dari Gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwasanya Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 yang artinya pemerintah Sumatera Barat masih bergantung ke pemerintah pusat atau belum mandiri mengurus daerahnya. Namun setelah tahun 2019 karena Covid-19 pemerintah Sumatera Barat mulai bisa mengelola daerah atau mengurangi ketergantungan akan pusat dengan penurunan Dana Perimbangan.



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2023)

Gambar 1.5 Perkembangan PDRB Sumatera Barat

Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti PAD dan Dana Perimbangan. Namun, faktor eksternal juga mempengaruhinya, PDRB contohnya. Berdasarkan pada gambar 1.5 di atas, dapat dilihat bahwasanya PDRB Sumatera Barat yang mengacu pada harga konstan 2010 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan. Kenaikan PDRB mencerminkan perkembangan ekonomi daerah Sumatera Barat. Kenaikan PDRB ini menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Sumatera Barat, baik dari sektor pertanian, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya.



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2023)

Gambar 1.6 Perkembangan Populasi Sumatera Barat

Pemerintah pusat dalam memberi Dana Perimbangan ke pemerintah daerah juga melihat berapa Jumlah Penduduk yang ada di setiap daerah. Penduduk sebagai input dalam proses pembuatan kebijakan dan sebagai tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Ni Putu Asri Diastari, 2017). Pemerintah pusat dalam hal ini harus mengetahui berapa alokasi besaran anggaran yang perlu diberikan supaya efektif dan efisien. Adanya pengetahuan akan Jumlah Penduduk atau Populasi, pemerintah pusat dapat mengukur apakah pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan Dana Perimbangan tersebut semata-mata demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan pada Gambar 1.6 di atas, Populasi Provinsi Sumatera Barat terus mengalami lonjakan penambahan penduduk. Penambahan Populasi ini mesti harus selaras dengan pembangunan infrastruktur. Adanya infrastruktur yang memadai membuat Populasi mempunyai kesempatan yang sama dalam pemakaiannya. Penambahan infrastruktur tersebut membuat Pengeluaran Pemerintah menjadi bertambah.

Dari penjabaran sebelumnya, daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki variabel-variabel yang saling berkaitan dalam mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah daerah. Daerah-daerah di Indonesia seperti Provinsi Sumatera Barat memiliki anggaran pengeluaran pemerintahnya tersendiri. Setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki anggaran dan realisasi pengeluaran pemerintah yang berbeda-beda. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, tergantung tuntutan dari masing-masing daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat disampaikan rumusan masalah yang akan diteliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat disampaikan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara lebih detailnya, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, adanya pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB dan Populasi mengacu pada penelitian yang sudah ada yang memiliki hampir semua kesamaan.

Hartanto (2015) meneliti pengaruh Jumlah Penduduk, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Pemerintah di Provinsi Riau tahun 2007-2011. Belanja Pemerintah adalah dana yang disisihkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam penyediaan layanan publik. Dalam menganalisis pengaruh faktor Jumlah Penduduk, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Pemerintah adalah tujuan dari penelitian ini. Perihal memilih hasil regresi antara *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*, penelitian ini menggunakan uji signifikansi dengan menggunakan strategi *fixed effect* dan *random effect*. Adapun data panel yang menggabungkan data *cross section* dan data *time series* adalah metode analisis yang digunakan dalam studi model regresi ini. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara PAD, DBH, DAU, dan DAK serta punya dampak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Adapun variabel Populasi memiliki tanda negatif dan berdampak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah.

Rusdi (2018) meneliti tentang laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode observasi atau turun ke lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Enrekang apakah realisasi tersebut yang keluar tepat sasaran dari yang dianggarkan. Hasil yang didapati adalah kinerja dari pendapatan sudah efektif namun target tidak tercapai. Sistem belanja daerah Kabupaten Enrekang dinilai sudah baik tetapi realisasinya rendah.

Dinda (2016) meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2016. Penelitian ini mempunyai suatu tujuan untuk mengetahui apakah daerah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kecondongan akan dana alokasi yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Melihat hal itu, adanya koefisien Dana Perimbangan lebih besar ketimbang koefisien Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan desain studi kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis panel dengan menggunakan data *time*

series dari tahun 2010-2016 dan data *cross section* dari 9 kabupaten dan kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Jumlah Penduduk memiliki dampak negatif terhadap Pengeluaran Pemerintah, namun Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki dampak positif.

Alodia dan Moristha (2016) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2010-2014. Semua Pengeluaran Pemerintah daerah dalam anggaran yang terdiri dari tiga aspek, yaitu bagian pendapatan, bagian pengeluaran rutin, dan bagian pengeluaran pembangunan disebut sebagai Belanja Daerah. Studi ini berusaha untuk memastikan bagaimana alokasi Belanja Daerah Provinsi Banten dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data panel yang menggabungkan data *cross section* dan data *time series* adalah metode analisis yang digunakan dalam studi model regresi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk, DAU, dan PAD berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi Belanja Daerah.

Andri, Arman, dan Junaidi (2014) meneliti pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi antara tahun 2007 sampai 2012. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah sedangkan variabel independennya adalah Jumlah Penduduk, DAU, dan PAD. Data sekunder dari APBD digunakan dalam penelitian ini. Adapun data panel yang menggabungkan data *cross section* dan data *time series* adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian Jumlah Penduduk, DAU, dan PAD berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi Belanja Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, DAU dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi 2007-2012.

Putrisandya & Dewi (2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah PDRB, DAU, dan PAD. Temuan penelitiannya adalah dimana PDRB secara langsung berdampak negatif sedangkan PAD dan DAU di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bali berdampak positif terhadap Belanja Daerah. Adapun IPM secara langsung mendapatkan manfaat dari Pendapatan Asli Daerah dan PDRB, sedangkan DAU memiliki dampak yang lebih kecil. Sementara itu, Belanja Daerah memiliki pengaruh negatif

yang besar terhadap IPM kabupaten dan kota di Provinsi Bali. DAU, PAD, dan PDRB tidak berperan sebagai mediator terhadap IPM di Provinsi Bali, kabupaten, maupun kota.

Dengan demikian, melihat posisi penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah yang menitikberatkan pada kemandirian daerah agar keluar dari ketergantungan pusat sedangkan posisi peneliti ini lebih menitikberatkan pada cara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan masalah ketimpangan antar kabupaten dan kota dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Ada yang berpendapat bahwa Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan komitmen daerah. Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Nordiawan dkk. (2012), Pengeluaran Pemerintah daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

A. Teori Peacock-Wiseman

Menurut Peacock-Wiseman (1961) menyatakan bahwa masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pengeluaran negara karena membutuhkan lebih banyak pajak. Untuk melakukan pembayaran pajak tambahan hingga titik tertentu, masyarakat masih toleran dalam membayar pajak. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari membayar pajak jika pemerintah menaikkan tarif pajak melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat umum. Karena pola pikir ini, pemerintah tidak bisa seenaknya menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

Dalam keadaan normal, meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak, pendapatan negara akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Negara akan meningkatkan pengeluarannya sebagai respons terhadap kenaikan pendapatan. Pemerintah perlu mengeluarkan lebih banyak uang ketika ada keadaan yang tidak biasa,

seperti perang. Karena keadaan ini, pemerintah cenderung memungut lebih banyak pajak dari masyarakat umum. Kenaikan pajak dapat menyebabkan investasi swasta menurun yang akan membatasi pertumbuhan ekonomi (Mangkoesoebroto, 1999).

B. Teori Keynes

Menurut teori ini, pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari permintaan agregat. Pendapatan nasional mempunyai rumus yaitu $Y = C + I + G + X - M$. Dimana Y berarti pendapatan nasional, C berarti konsumsi, I berarti investasi, G berarti Pengeluaran Pemerintah, X berarti ekspor, dan M berarti impor. Y merupakan penawaran agregat sedangkan C, I, G, X, dan M merupakan permintaan agregat.

C. Teori Keagenan

Menurut Harahap (2011) keagenan adalah perusahaan berfungsi sebagai tempat perjanjian kontrak antara pemerintah, kreditur, pemilik, dan manajemen. Gagasan ini membentuk hubungan antara kelompok-kelompok ini dan menjelaskan pelacakan berbagai jenis biaya. Menurut Suwardjono (2010), Hubungan keagenan adalah suatu hubungan di mana agen bertindak untuk prinsipal dan atas nama prinsipal dengan menerima suatu imbalan atas usahanya. Menurut Halim & Kusufi (2012) menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori mengenai interaksi antara prinsipal dan agen. Pemerintah provinsi, daerah, dan lokal dapat berfungsi sebagai agen atau prinsipal dalam kerangka teori keagenan.

D. Teori Stakeholder

Menurut Hadi (2014) pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pemerintah, pesaing bisnis, komunitas lokal, lingkungan global, lembaga-lembaga di luar bisnis (seperti lembaga swadaya masyarakat), kaum minoritas, dan lain sebagainya yang keberadaannya memiliki dampak signifikan terhadap bisnis. Menurut teori ini, pemangku kepentingan utama yang perlu diperhitungkan adalah masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut Lako (2011), mengukur keberhasilan organisasi berdasarkan kapasitasnya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, perencanaan yang efektif menentukan efektivitas program komunikasi (Rusdianto, 2013). Pemangku kepentingan yang akan terkena dampak langsung dari program komunikasi, tidak dapat diabaikan ketika membuat program komunikasi yang efektif. Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mempengaruhi keputusan mengenai penggunaan sumber daya keuangan yang terbaik.

Semua jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat disebut sebagai Pengeluaran Pemerintah. Dalam memastikan bahwa anggaran selalu diatur untuk mencerminkan uang yang berhasil dikumpulkan, Pengeluaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Pengeluaran Pemerintah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan daerah:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung mengacu pada belanja yang tidak secara langsung digunakan oleh program atau kegiatan. Jenis-jenis pengeluaran tidak langsung meliputi:

- 1.) Belanja pegawai, yaitu jumlah uang yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas kerja mereka. Misalnya adalah gaji.
- 2.) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga atas utang berdasarkan komitmen pokok, sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- 3.) Belanja subsidi, yaitu belanja yang dialokasikan kepada perusahaan atau organisasi lain untuk membantu biaya produksi atau lembaga-lembaga tertentu agar masyarakat umum mampu menjangkau harga jual produksi dan jasa.
- 4.) Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, serta organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah ini dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa.

5.) Belanja bantuan sosial atau penyediaan bantuan keuangan dan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal dengan belanja bantuan sosial.

6.) Belanja bagi hasil atau anggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi diturunkan kepada kabupaten/kota, pendapatan kabupaten/kota diturunkan lagi kepada pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebut sebagai belanja bagi hasil.

7.) Belanja bantuan keuangan dimanfaatkan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, belanja bantuan keuangan biasanya digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya.

8.) Belanja tidak terduga yang merupakan suatu tindakan pengeluaran yang bertujuan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi, seperti penanggulangan bencana sosial dan bencana alam yang tidak diperkirakan sebelumnya, atau pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dikenal dengan istilah belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja yang digunakan untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan yang disebut sebagai belanja langsung. Jenis-jenis belanja langsung meliputi:

1.) Belanja pegawai langsung yang sering kali merupakan belanja gaji yang digunakan untuk melaksanakan inisiatif pemerintah daerah.

2.) Belanja langsung yang terdiri dari barang dan jasa yang merupakan belanja untuk perolehan komoditas yang masa manfaatnya kurang dari satu

tahun dan penggunaan jasa untuk melaksanakan inisiatif pemerintah daerah.

3.) Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang terjadi untuk membeli, memperoleh, atau membangun aset tetap berwujud seperti tanah, gedung, mesin, irigasi, jalan, dan aset tetap lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang dikenal sebagai keuangan daerah digunakan untuk mengeksplorasi surplus atau untuk menutupi kekurangan anggaran. Perbedaan antara anggaran pendapatan daerah dengan pengeluaran daerah adalah menghasilkan defisit atau surplus. Tujuan pembiayaan daerah adalah untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang sedang terjadi atau tahun anggaran berikutnya.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Semua uang yang diterima oleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundangan setempat disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Karenanya, hal ini menentukan apakah suatu daerah mampu mendukung pertumbuhan daerahnya atau tidak. Pendapatan asli daerah adalah area administrasi yang penting. Berikut ini adalah beberapa sumber pendapatan asli daerah:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk keperluan daerah semata-mata demi kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup biaya jasa atau pemberian izin tertentu guna kepentingan masyarakat.

c. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari kekayaan negara yang berada di bawah pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

d. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, selisih lebih dan selisih kurang nilai tukar mata uang, pendapatan bunga deposito, jasa giro, dan tuntutan ganti rugi dan komisi didefinisikan sebagai lain-lain pendapatan yang sah menurut UU No. 33/2004 tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.2.3. Dana Perimbangan

Merujuk pada UU No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendanai pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka pembentukan daerah otonom. Dana Perimbangan dibentuk secara khusus untuk membantu pelaksanaan program-program otonomi daerah. Hal tersebut meningkatkan sektor publik, termasuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga daerah mendapatkan Dana Perimbangan. UU No. 33/2004 menyatakan bahwa dana perimbangan dibagi menjadi tiga kategori:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil yang dibagi menjadi tiga bagian merupakan sumber pendapatan daerah yang mempertimbangkan potensi daerah penghasil.

- 1.) Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- 2.) Dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 3.) Dana bagi hasil untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum ini merupakan dana APBN yang didistribusikan kepada daerah untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka memastikan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan

desentralisasi. Upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, Dana Alokasi Umum dibagi menjadi dua bagian berikut:

- 1.) Dana Alokasi Umum Provinsi
- 2.) Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus ini memiliki batasan maksimum yaitu tiga tahun dan hanya digunakan untuk investasi dalam akuisisi dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai inisiatif umum di berbagai bidang yang tersedia, serta inisiatif khusus yang diprioritaskan dan didanai secara nasional oleh pemerintah. Namun demikian, beberapa industri seperti pelatihan, administrasi, perjalanan karyawan, persiapan proyek fisik, dan biaya umum terkait hal lainnya tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus.

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah barang dan jasa yang ditentukan berdasarkan harga berlaku pada setiap tahun disebut sebagai PDRB atas dasar harga berlaku sedangkan nilai tambah barang dan jasa yang ditentukan berdasarkan harga pada tahun dasar disebut sebagai PDRB atas dasar harga konstan. Dua pendekatan untuk menghitung PDRB tersebut mempunyai interpretasi masing-masing (Kuncoro, 2004).

Menurut Todaro dalam Rudibdo (2017), pertumbuhan ekonomi adalah perluasan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk memasok produk-produk ekonomi kepada warganya. Kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan situasi saat ini menentukan atau memungkinkan pertumbuhan kapasitas itu sendiri. Bagian ini juga menekankan bahwa meskipun kapasitas untuk memproduksi berbagai macam komoditas merupakan indikasi kematangan ekonomi di suatu negara, peningkatan

produksi yang berkelanjutan merupakan cerminan dari apa yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, praktik peningkatan produksi per kapita dalam jangka waktu yang lama adalah definisi lain dari pertumbuhan ekonomi. Ada tiga hal yang secara khusus disoroti dalam hal ini:

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dan bukan sebuah potret keadaan ekonomi pada satu titik waktu. Hal ini juga dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ekonomi memiliki elemen dinamis yang menyiratkan bahwa ekonomi terkadang berevolusi.
- b. Kenaikan output per kapita dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik populasi maupun total output harus diperhitungkan dalam produk akhir.
- c. Suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika output per kapita meningkat dalam jangka waktu yang lama (10, 20, 50, atau bahkan lebih lama lagi).

2.2.5. Populasi

Populasi adalah kumpulan orang yang tinggal di suatu lokasi atau wilayah yang sama. Setiap tahun, Jumlah Penduduk akan bertambah hingga mencapai titik dimana secara finansial akan menjadi sulit untuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan masyarakat lainnya. Menurut (Putriani, 2011), jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan permintaan akan barang publik semakin besar. Permintaan ini harus diimbangi dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik yang dapat mengakibatkan anggaran belanja pemerintah menjadi lebih tinggi.

2.3. Hubungan antar Variabel

2.3.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pengeluaran Pemerintah

Dalam penelitiannya, Jolianis (2014) menyatakan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan mengalami peningkatan jumlah belanja daerah. Menurut Nurdini dkk (2015) terdapat juga keyakinan bahwa suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri jika PAD nya lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu definisi Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber dayanya. Ketika sebuah tempat memiliki sumber daya alam yang

melimpah dan dikelola dengan baik oleh elemen-elemen yang mampu meningkatkan produktivitas maka PAD akan meningkat.

2.3.2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pengeluaran Pemerintah

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dikenal sebagai Dana Perimbangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran dan menyamakan kedudukan di berbagai daerah sehingga pemerintah daerah dapat beroperasi secara mandiri dan memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk membiayai pengeluaran melalui perimbangan keuangan yang diciptakan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN dan didistribusikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana-dana tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

2.3.3. Hubungan PDRB dengan Pengeluaran Pemerintah

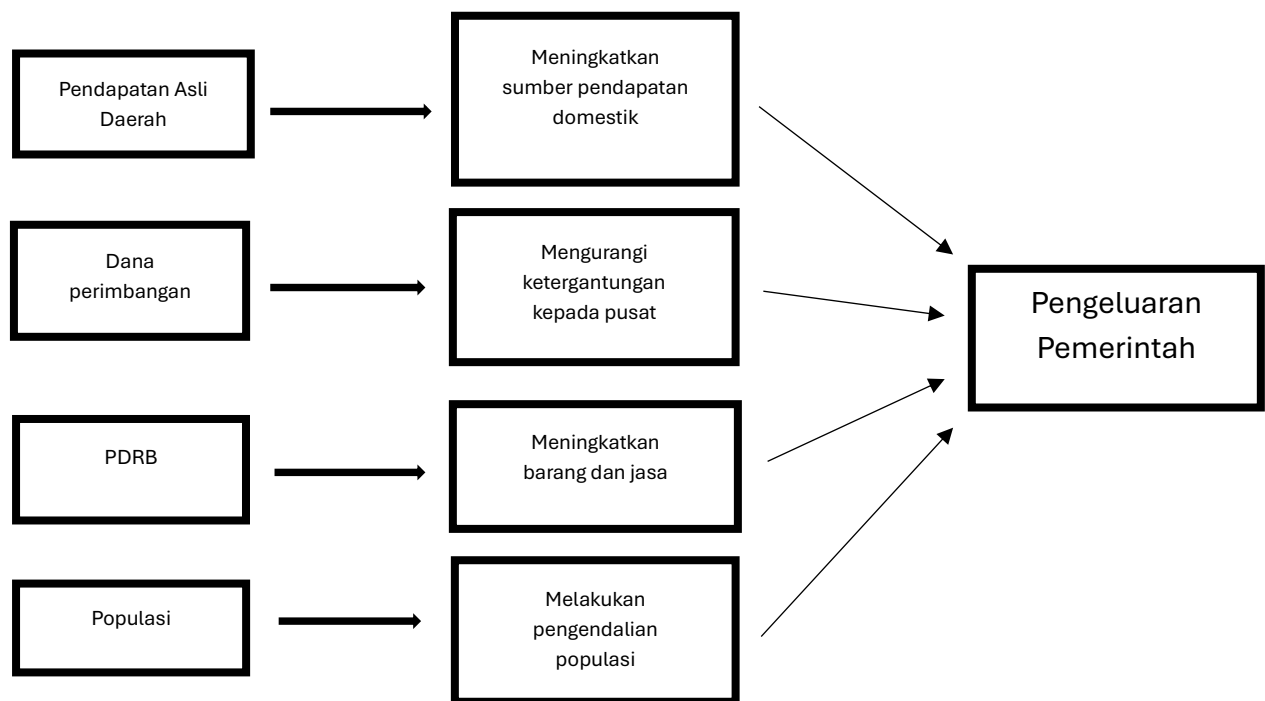
Karena PDRB merupakan fungsi dari PAD, maka keduanya memiliki hubungan fungsional. Potensi sumber pendapatan suatu daerah meningkat seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita (Thamrin dalam Iskandar, 2012). Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi kapasitas ekonomi, semakin tinggi pula pendapatan daerah. Selain itu, proyek-proyek pembangunan daerah akan dibiayai dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, ada korelasi positif antara PDRB dan Pengeluaran Pemerintah. Pengeluaran Pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan PDRB.

2.3.4. Hubungan Populasi dengan Pengeluaran Pemerintah

Populasi saat ini dan yang akan terjadi nanti adalah fokus dari pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan populasi, maka secara alamiah akan terjadi peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas dan infrastruktur publik. Populasi yang terus bertambah akan menuntut anggaran, dan pertambahan penduduk harus terus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pengendalian pertambahan penduduk selalu diperlukan agar tidak terjadinya masalah perekonomian.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari kajian pustaka dan landasan teori dalam mengungkapkan masalah yang terjadi. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut ini:



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Ada empat hipotesis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga memiliki dampak yang positif terhadap pengeluaran pemerintah.
2. Dana Perimbangan diduga memiliki dampak yang positif terhadap pengeluaran pemerintah.
3. PDRB diduga memiliki dampak yang positif terhadap pengeluaran pemerintah.
4. Populasi diduga memiliki dampak yang positif terhadap pengeluaran pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang digunakan. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dapat langsung dihitung sebagai variabel angka atau bilangan. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan secara tidak langsung melalui buku, jurnal, arsip yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, dan media perantara. Data kuantitatif adalah data studi yang digunakan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKEU) sebagai sumber utama data kuantitatif. Para peneliti menggunakan pendekatan data panel yang menggabungkan data *cross section* dan *time series* untuk mengumpulkan data sekunder.

Data *cross section* dan *time series* akan digunakan dalam investigasi ini. Data runtun waktu tahunan yang digunakan mencakup tahun 2013 hingga 2023. Di sisi lain, data *cross section* yang digunakan menggambarkan 19 kabupaten dan kota yang membentuk Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini memakai 2 jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau bisa disebut variabel *x* sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau bisa disebut variabel *y*.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah yang merupakan jumlah total uang yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota antara tahun 2013 dan 2023, dinyatakan dalam juta rupiah.

3.2.2 Variabel Independen

.Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto, dan Populasi.

a. Pendapatan Asli Daerah

Semua uang yang diterima oleh suatu daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan satuan miliar rupiah, data PAD dikumpulkan dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai 2023.

b. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan untuk membantu dan membiayai pelaksanaan program desentralisasi dengan tujuan untuk menciptakan daerah yang mandiri pada 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2013 sampai 2023 dalam satuan miliar rupiah.

c. Produk Domestik Regional Bruto

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yaitu PDRB yang dihasilkan oleh 19 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dalam tahun yang dihitung dari 2013 sampai 2023 dihitung dalam satuan miliar rupiah.

d. Populasi

Kumpulan individu yang tinggal di suatu area atau wilayah tertentu. Data yang dikumpulkan dari tahun 2013 sampai 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Data diperoleh dari 19 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dalam satuan jiwa.

3.3 Metode Analisis Data

Regresi data panel adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur dampak dari penggabungan dua set data yaitu *time series* dan *cross section*. *Time series* yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu seperti kuartal, bulan, hari, atau tahun sedangkan data *cross section* yaitu data yang dikumpulkan secara simultan dari beberapa orang, bisnis, dan wilayah. Tujuan penggabungan adalah untuk memberikan lebih banyak data dan memperoleh hasil dengan tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Ketika kedua bentuk data tersebut digabungkan akan terlihat bahwa variabel dependen mencakup kumpulan observasi selama periode waktu yang telah ditentukan dan menjangkau beberapa lokasi dan periode waktu secara kohesif (Widarjono, 2009).

Hanya ada satu persamaan regresi yang dapat digunakan untuk regresi data panel. Kombinasi dua data, yaitu *cross section* dan *time series* akan memberikan derajat kebebasan yang lebih besar sehingga regresi data panel dapat mengatasi masalah ketika ada variabel yang dihilangkan (Omitted Variable) (Widarjono, 2016). Hasil analisisnya akan lebih baik secara statistik. Persamaan model untuk model regresi data panel dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 P_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

PP = Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat.

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun t.

DP_{it} = Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Barat tahun t.

$PDRB_{it}$ = PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun t.

P_{it} = Populasi di Provinsi Sumatera Barat tahun t.

β_0 = Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, dan β_4 = Koefisien variable Independen.

ϵ_{it} = Error term.

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Sriyana (2014), ada tiga model regresi yang mungkin dihasilkan oleh analisis regresi data panel. Model-model tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Model *common effect* (mengasumsikan bahwa intersep dan slope adalah konstan untuk setiap orang dan waktu).
- b. Model *fixed effect* (mengasumsikan bahwa meskipun intersep bervariasi dari satu orang ke orang lain, namun kemiringannya konstan).
- c. Model *random effect* (mengasumsikan intersep berubah seiring dengan waktu dan antar objek, namun kemiringannya dianggap tetap konstan).

1. *Common Effect Model*

Dengan menggunakan metode OLS, Model *Common Effect* merupakan model langsung yang menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa memperhitungkan ukuran antar waktu dan unit individu. Setiap koefisien intersep pada model CEM ini memiliki slope yang sama pada koefisien data *cross section* dan *time series*. Berikut ini adalah salah satu cara untuk menyatakan persamaan Model *Common Effect*:

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 P_{it} + \epsilon_{it}$$

2. *Fixed Effect Model*

Dalam analisis regresi data panel, model *fixed effect* adalah model yang mengasumsikan bahwa kemiringan antar unit tetap sama sementara intersep antar unit bervariasi. Variabel *dummy* dapat digunakan untuk menangkap variasi dalam intersep antar variabel ketika mengestimasi dengan metode ini. Berikut ini adalah salah satu cara untuk menyatakan persamaan model *Fixed Effect*:

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 P_{it} + \epsilon_{it}$$

3. *Random Effect Model*

Model yang dikenal sebagai model efek acak yang dihitung dengan menggunakan variabel gangguan yang mungkin terkait dengan *time series* dan *cross section*. Karena variabel gangguan bervariasi dari satu orang ke orang lain, metode efek acak juga dikenal sebagai metode komponen kesalahan. Oleh karena itu, intersepnya diyakini sebagai $\alpha_i = \alpha + \mu_i$.

Kesalahan acak dilambangkan dengan μ_i . Berikut ini adalah salah satu cara untuk mengekspresikan persamaan *Random Effect Model* (REM):

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 P_{it} + v_{it}$$

Untuk memilih tiga model terbaik yang akan menghasilkan regresi yang memuaskan, sejumlah pengujian harus dilakukan ketika mengestimasi data panel. Teknik pendekatan yang baik memerlukan beberapa tahapan termasuk dalam melakukan regresi model CEM dan FEM dengan menggunakan uji *Chow* untuk memastikan bahwa hasil regresi yang diperoleh baik. Untuk memastikan apakah model-model *Fixed* atau *Random* lebih baik harus melakukan uji *Hausman* jika uji FEM adalah pilihan terbaik.

3.4 Pemilihan Model

Dua uji kecocokan model terbaik dalam perhitungan statistik digunakan dalam pemilihan model penelitian ini, dan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Uji *Chow* adalah teknik untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Common Effect Model* (CEM).
2. Uji *Hausman* adalah teknik untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).
3. Uji *Lagrange Multiplier* adalah teknik untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM).

3.4.1 Uji *Chow*

Dengan mengasumsikan bahwa setiap unit dalam penampang lintang menunjukkan perilaku tidak realistis yang sama meskipun mungkin saja setiap unit menunjukkan perilaku yang berbeda. *Pooled Least Square* adalah model yang terkendala jika diterapkan yang memiliki intersep yang sama pada semua objek yang dapat diterapkan pada kenyataan. Uji *Chow* atau F-Statistik dapat digunakan untuk menentukan model dan hipotesis berikut ini

H_0 : *Pooled Least Square/ Common Effect Model (Restricted)*

H_a : *Fixed Effect Model (Unrestricted)*

Restricted F-Test dapat dirumuskan dengan cara sebagai berikut Keterangan :

$$F = \frac{SSRR - SSRU / q}{SSRU / (n - k)}$$

SSRR = *Sum of Squared Restricted Model*

SSRU = *Sum of Squared Unrestricted Model*

q = Jumlah Restriksi

n = Jumlah Observasi

k = Jumlah Parameter dalam Model

Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka H_0 ditolak yang mengarah pada kesimpulan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang cocok untuk digunakan. Di sisi lain, *Common Effect Model* adalah model yang berguna untuk digunakan jika nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel yang mengindikasikan bahwa H_0 tidak dapat ditolak. *Fixed Effect Model* adalah model yang tepat untuk digunakan berdasarkan nilai probabilitas *cross section chi-square*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha, maka mengindikasikan adanya signifikansi dan menolak H_0 . Kesimpulannya adalah Model *Common Effect* paling ideal untuk digunakan.

Uji *Hausman* harus digunakan lagi jika model *Fixed Effect* digunakan untuk menentukan mana yang lebih baik antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Jika model *Common Effect* yang digunakan, Uji LM juga harus digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik.

3.4.2 Uji *Hausman*

Ketika memilih antara model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*, sebuah tes dilakukan untuk menentukan nilai statistik *Chi-square*. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan secara statistik. Asumsi-asumsi berikut ini digunakan dalam pelaksanaan pengujian:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Uji *Hausman*, dalam mengikuti distribusi *chi-square* adalah sebagai berikut:

$$m = \hat{q}Var(\hat{q})^{-1}\hat{q}$$

Keterangan:

m : Nilai *Chi-squares* statistik dari uji *Hausman*

$\hat{q}$: Perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

$var(\hat{q})$: Kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

Setelah dilakukan pengujian, model *Fixed Effect* merupakan model yang tepat jika nilai statistik *Hausman* lebih tinggi dari nilai kritis sehingga menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritis, H_0 tidak dapat ditolak yang mengindikasikan bahwa model *Random Effect* adalah model yang tepat. Lebih lanjut, uji *Hausman* dapat diamati pada nilai *random cross section*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha maka signifikan dan mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang tepat jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha maka tidak signifikan dan tidak menolak H_0 jika nilai *random cross section* lebih besar dari nilai alpha maka mengindikasikan bahwa *Random Effect Model* adalah model yang tepat.

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Adalah uji untuk memutuskan apakah akan menggunakan model Common Effect (OLS) atau model Random Effect. Breusch Pagan adalah orang yang pertama kali mempresentasikan uji signifikansi Random Effect ini. Nilai residual dari teknik OLS menjadi dasar dari pendekatan Breusch Pagan untuk uji signifikansi Random Effect. Rumus sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T\hat{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan:

n : Jumlah Individu

T : Jumlah periode waktu

e : Residual metode *Common Effect* (OLS)

Pendekatan *Random Effect* dipilih daripada pendekatan *Common Effect* dan hipotesis nol ditolak jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis *chi-square*. Di sisi lain, hipotesis nol diterima dan pendekatan *Common Effect* diterapkan sebagai pengganti pendekatan *Random Effect* jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai kritis *chi-square*. Akan tetapi, uji *Chow* dan *Hausman* menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* adalah yang paling sesuai dalam situasi ini, oleh karena itu uji LM tidak diperlukan. Hanya saja ketika uji *Hausman* dilakukan bahwa model *Random Effect* adalah yang paling tepat dan uji *Chow* menunjukkan bahwa model *Common Effect* lebih tepat, maka uji LM dapat digunakan.

3.5. Pengujian Statistik

Uji koefisien determinasi (*R-squared*) merupakan uji statistik yang akan dilakukan sedangkan uji koefisien regresi akan dilakukan secara bersama-sama (Uji Statistik F), dan uji koefisien regresi dilakukan secara terpisah dari masing-masing variabel (Uji Statistik t) akan digunakan dalam analisis statistik.

3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *R-Squared* sangat membantu dalam menghitung jumlah variasi yang dijelaskan oleh variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen jika koefisien determinasi sama dengan nol. Sebaliknya, ketika *R-squared* sama dengan satu, maka variabel independen dapat menjelaskan varian variabel dependen.

3.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk melihat keseluruhan variabel independen apakah secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,05 (α 5%). Pengujian yang dilakukan terhadap seluruh koefisien regresi secara simultan yaitu uji F, pengujiannya adalah sebagai berikut:

Hipotesis:

H0: Jika probabilitas $\beta_1 > 0,05$ maka secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Ha: Jika probabilitas $\beta_1 < 0,05$ maka secara bersama-sama memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji t

Uji t yang biasa juga dikenal sebagai uji parsial atau uji variabel saja digunakan saat menentukan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan dampak pada variabel dependen secara individual. Dengan asumsi bahwa variabel independen memiliki nilai konstan, pengujian dilakukan pada tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hipotesis berikut memandu pelaksanaan uji t-statistik ini:

Hipotesis:

H0: Variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika probabilitas β_1 lebih besar dari 0,05.

Ha: Variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika probabilitas β_1 lebih kecil dari 0,05.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Di dalam bab IV ini berisi tentang suatu penelitian yang memperlihatkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto, dan populasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau disebut variabel independen sedangkan Pengeluaran Pemerintah adalah variabel dependen. Faktor-faktor dan Pengeluaran Pemerintah, datanya didapati via website resmi pemerintah daerah, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang telah tersedia tanpa perlu mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan data berbentuk data panel yang mana menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Ada sebanyak 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat di mana di antaranya itu 12 kabupaten dan 7 kota yang merupakan *cross section* dalam penelitian ini. Adapun data *time series* merujuk pada rentetan waktu yang digunakan dalam sebuah penelitian. Waktu yang digunakan adalah tahunan dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Dalam pengujiannya digunakan perangkat lunak Eviews 12 dan Microsoft Excel dengan metode analisis ekonometrik.

Tabel 4.1 Hasil Statistik Dekriptif

	PP	PAD	DP	PDRB	P
Mean	9.90E+08	1.02E+08	7.798E+08	8463852.	284379.1
Median	9.32E+08	80459854	7.40E08	6490286	237376.0
Maximum	3.08E+09	6.59E+08	1.64E+09	49316187	950871.0
Minimum	3.93E+08	20639404	3.36E+08	1839183	39536.00
Std. Dev	4.24E+08	98882288	2.89E+08	8499137	211124.7
Observation	209	209	209	209	209

Sumber: Eviews 12

4.2 Hasil Pengolahan Data

4.2.1 Common Effect Model

Model penelitian ini adalah menggabungkan data *cross section* dan *time series* sebagai suatu integrasi dan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Model ini adalah model yang paling sederhana apabila dihubungkan dengan dua model lain yang outputnya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68011596	22173286	3.067276	0.0025
PAD	1.004059	0.196085	5.120524	0.0000
DP	0.902371	0.046052	19.59450	0.0000
PDRB	-1.121122	3.455773	-0.324420	0.7460
P	442.1024	104.4413	4.233021	0.0000
R-squared	0.958470			
F-statistik	1177.015			
Prob (F-statistik)	0.000000			

Sumber: Eviews 12

4.2.2 Fixed Effect Model

Model penelitian ini merupakan model yang di mana terdapat intercept yang berbeda beda dalam tiap subjek namun tiap subjek mempunyai slope yang tidak berubah setiap berjalannya waktu. FEM dikenal sebagai *Model Least Square Dummy Variables* (LSDV) yang mana outputnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.83E+08	1.18E+08	1.546141	0.1238
PAD	1.210483	0.331444	3.652146	0.0003
DP	0.709885	0.080243	8.846645	0.0000
PDRB	3.028896	8.609849	0.351794	0.7254
P	369.1230	505.4347	0.730308	0.4661
R-squared	0.964043			
F-statistik	226.6742			
Prob (F-statistik)	0.000000			

Sumber: Eviews 12

4.2.3 Random Effect Model

Model penelitian ini merupakan model yang mengasumsikan variabel sisa memiliki korelasi dengan *cross section* dan *time series*. Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan pada model *fixed effect*. Syarat dalam menggunakan model ini adalah jumlah *cross section* harus lebih besar dari jumlah variabel penelitian yang mana outputnya sebagai berikut:

Tabel 4.4 Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68011596	21607161	3.147641	0.0019
PAD	1.004059	0.191079	5.254686	0.0000
DP	0.902371	0.044876	20.10789	0.0000
PDRB	-1.121122	3.367540	-0.332920	0.7395
P	442.1024	101.7748	4.343930	0.0000
R-squared	0.958470			
F-statistik	1177.015			
Prob (F-statistik)	0.000000			

Sumber: Eviews 12

4.2.4 Uji *Chow*

Uji ini merupakan uji yang di mana memilih di antara dua model yaitu *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Untuk mendapatkan jenis model yang terbaik, diperlukan nilai probabilitas sebesar 0,05 (5%). Apabila probabilitas chi squarenya dibawah 5% maka model terbaik adalah FEM sedangkan bila diatas 5% maka model terbaiknya adalah CEM. Berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4. 5 Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.601664	(18,186)	0.0631
Cross-section Chi-square	30.116932	18	0.0363

Sumber: Eviews 12

Melihat tabel diatas, diperoleh probabilitas *cross section chi-square* adalah $0,0363 < 0,05$. Adanya perbandingan tersebut maka model yang dipilih adalah FEM yang artinya menolak H_0 .

4.2.5 Uji *Hausman*

Uji ini merupakan uji di mana memilih di antara dua model yaitu *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Untuk mendapatkan jenis model yang terbaik, diperlukan nilai probabilitas sebesar 0,05 (5%). Apabila probabilitas random dibawah 5% maka model terbaik adalah FEM sedangkan bila diatas 5% maka model terbaiknya adalah REM. Berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4.6 Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.125389	4	0.0001

Sumber: Eviews 12

Melihat tabel diatas, diperoleh probabilitas *cross section random* adalah $0,0001 < 0,05$. Adanya perbandingan tersebut maka model yang dipilih adalah FEM yang artinya menolak H_0 .

4.3.3 *Fixed Effect Model*

Berdasarkan dari hasil pengolahan data yang dilakukan melalui uji *Chow* dan uji *Hausman* didapati bahwasanya model terbaik antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* adalah Fixed Effect Model seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Model Terbaik *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.83E+08	1.18E+08	1.546141	0.1238
PAD	1.210483	0.331444	3.652146	0.0003
DP	0.709885	0.080243	8.846645	0.0000
PDRB	3.028896	8.609849	0.351794	0.7254
P	369.1230	505.4347	0.730308	0.4661
R-squared	0.964043			
F-statistik	226.6742			
Prob (F-statistik)	0.000000			

Sumber: Eviews 12

Persamaan regresi

$$PP = 1.83E+08 + 1.210483 (PAD) + 0.709885 (DP) + 3.028896 (PDRB) + 369.1230 (P)$$

Keterangan :

PP = Pengeluaran Pemerintah

β_0 = Intersept

β_1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah

β_2 = Koefisien Dana Perimbangan

β_3 = Koefisien Produk Domestik Regional Bruto

β_4 = Koefisien Populasi

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam pengujian hipotesis ini diperlihatkan seberapa besar pengaruh determinasi dari variabel x terhadap variabel y. Apabila semakin besar persentase dari variabel x maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap variabel y.

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.964043
Adjusted R-squared	0.959790

Sumber: Eviews 12

Melihat tabel diatas, maka didapati hasil yang menyatakan bahwasanya variabel x sebesar 0,964043 atau 96,40% itu hampir mendekati 100% untuk mempengaruhi variabel y. Adapun hasil lainnya sebesar 0,035957 atau 03,59% merupakan faktor-faktor yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.2.7 Uji Simultan (uji F)

Uji ini adalah uji di mana memperlihatkan seberapa besar pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk membuktikan adanya pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen diperlukan nilai probabilitas dibawah 0,05 atau 5% dan jika diatas batas yang telah ditentukan maka keseluruhan variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.9 Uji F

F-statistic	226.6742
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12

Melihat tabel diatas, maka didapati hasil yang menyatakan bahwasanya F-statistik sebesar 226,6742 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang kurang dari 0,05 atau 5%. Hal itu mengindikasikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini secara komprehensif memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

4.2.8 Uji Parsial (uji t)

Uji ini merupakan uji yang di mana melihat pengaruh satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini merupakan kebalikan dari uji simultan yang mengkomper keseluruhan variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.83E+08	1.18E+08	1.546141	0.1238
PAD	1.210483	0.331444	3.652146	0.0003
DP	0.709885	0.080243	8.846645	0.0000
PDRB	3.028896	8.609849	0.351794	0.7254
P	369.1230	505.4347	0.730308	0.4661

Sumber: Eviews 12

Melihat tabel diatas, maka didapati hasil yang menyatakan bahwasanya dari 4 variabel independen hanya 2 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yakni variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Perimbangan sedangkan variabel PDRB dan variabel Populasi tidak mempengaruhi variabel dependen. 2 variabel yang mempengaruhi itu mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 sedangkan 2 variabel lainnya diatas 0,05. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Probabilitas variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,0003 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Barat pada periode 2013 sampai 2023. Koefisien sebesar 1.2104 yang berarti kenaikan Pendapatan asli Daerah sebesar Rp 1 miliar akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1.2104 miliar.

b. Variabel Dana Perimbangan

Probabilitas variabel Dana Perimbangan sebesar 0,0000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini berarti Dana Perimbangan berpengaruh

terhadap Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Barat pada periode 2013 sampai 2023 dengan Koefisien sebesar 0.7098 yang berarti kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1 Miliar akan menyebabkan kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.7098 miliar.

c. Variabel Produk Domestik Regional Bruto

Probabilitas variabel PDRB sebesar 0,7254 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$) sehingga menerima H_0 dan menolak H_a . Hal ini berarti PDRB tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Barat pada periode 2013 sampai 2023. Koefisien sebesar 3.0288 yang berarti kenaikan PDRB sebesar 1 Miliar akan menyebabkan kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 3.0288 miliar.

d. Variabel Populasi

Probabilitas variabel Populasi sebesar 0,4661 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$) sehingga menerima H_0 dan menolak H_a . Hal ini berarti Populasi tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Barat pada periode 2013 sampai 2023. Koefisien sebesar 369.1230 yang berarti kenaikan Populasi sebesar 1 juta jiwa akan menyebabkan kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 369.1230 miliar.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah

Melihat dari hasil penelitian yang sudah diinterpretasikan, membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari PAD terhadap pengeluaran pemerintah Sumatera Barat pada rentang waktu 2013-2023. Pengaruh ini membuat PAD punya peran tersendiri dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah Sumatera Barat. Tidak hanya itu, PAD punya pengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah Sumatera Barat yang mana setiap kenaikan PAD maka akan menaikkan pengeluaran pemerintah Sumatera Barat. Apabila punya pengaruh negatif maka setiap penurunan PAD akan menurunkan pengeluaran pemerintah Sumatera Barat. Hasil positif tersebut membuktikan bahwa ketika PAD yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah adalah bentuk kemandirian daerah untuk mengurus rumah tangganya dalam bentuk pelimpahan tugas dari pusat ke daerah atau desentralisasi. Pemerintah daerah harus meminimalkan ketergantungan akan pemerintah pusat dengan cara menaikkan PAD agar bisa bisa membiayai pengeluaran pemerintah (Halim, 2007).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nailufar dan Sufitrayati, 2019) yang mempunyai hasil penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh kepada Pengeluaran Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2010-2015. Jadi kesimpulan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023 memiliki PAD yang berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah dan mengalami peningkatan pengeluaran.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah

Melihat dari hasil penelitian yang sudah diinterpretasikan, membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Dana Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat pada rentang waktu 2013-2023. Pengaruh ini membuat Dana Perimbangan punya peran tersendiri dalam meningkatkan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat. Tidak hanya itu, Dana Perimbangan punya pengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat yang mana setiap kenaikan Dana Perimbangan maka akan menaikkan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat. Apabila punya pengaruh negatif maka setiap penurunan Dana Perimbangan akan menurunkan pengeluaran pemerintah Sumatera Barat. Hasil positif tersebut membuktikan bahwa ketika pemerintah daerah mendapat transfer dana dari pusat maka pemerintah tersebut pasti akan menaikkan pengeluarannya untuk menjalankan fungsi desentralisasi agar tercapai pemerataan pembangunan dan pengentasan ketimpangan ekonomi. Ini merupakan bentuk sifat dari Dana Perimbangan agar terciptanya keseimbangan fiskal antar daerah. Daerah-daerah yang belum bisa secara mandiri mengurus daerahnya seperti Sumatera Barat, Dana Perimbangan merupakan alasan yang paling kuat mengapa pemerintah pusat perlu turun tangan agar daerah-daerah tersebut bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk kemakmuran. Sembari menggunakan Dana Perimbangan, Sumatera Barat dan daerah-daerah lainnya perlu secara terus-menerus meningkatkan PAD-nya agar kemandirian daerah bisa tercapai.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2011) yang mana mempunyai hasil penelitian yaitu Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008. Jadi kesimpulannya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023 memiliki Dana Perimbangan yang berpengaruh terhadap peningkatan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap pengeluaran Pemerintah

Melihat dari hasil penelitian yang sudah diinterpretasikan, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh dari PDRB terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat pada rentang waktu 2013-2023. Hal ini terjadi karena Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang mana berpengaruh signifikan. Meskipun PDRB mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, tetap belum bisa mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah karena PDRB tidak hanya dikuasai oleh pemerintah tapi juga ada pihak swasta. Adanya penguasaan oleh pihak swasta ini, membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya leluasa dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini sesuai dengan oleh (Fatharani, Fadliyanti, Agustiani, 2020) yang mempunyai hasil penelitian yaitu PDRB tidak mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019. Jadi kesimpulannya adalah Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan membuat PDRB belum bisa mempunyai pengaruh dalam peningkatan Pengeluaran Pemerintah akibat dari pemerintah yang masih mengandalkan Dana Perimbangan.

4.3.4 Pengaruh Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah

Melihat dari hasil penelitian yang sudah diinterpretasikan, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat pada rentang waktu 2013-2023. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Sumatera Barat tidak menjadikan Populasi sebagai alasan untuk menambah pengeluaran. Meskipun Populasi mengalami kenaikan laju pertumbuhan, pemerintah daerah tetap mengambil langkah bahwasanya Pengeluaran Pemerintah didasarkan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dapat dilihat juga, Populasi di Sumatera Barat mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi sehingga Pengeluaran Pemerintah tidak terpengaruh. Oleh sebab itu, Populasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana dan Asrama, 2024) yang mempunyai hasil yaitu di mana populasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2022). Jadi kesimpulannya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023 memiliki Populasi yang belum berpengaruh terhadap peningkatan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat. Dalam

pengalokasian belanja tidak terpaku kepada tingkat populasi, karena kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila PDRB per kapita meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di bab sebelumnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB, dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2023 didapati beberapa kesimpulan yakni:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB, dan Populasi mampu menjelaskan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023 sebesar 0.958470% dan sisanya sebesar 0.0372% yang dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini .Hal berarti sesuai dengan hipotesis penelitian sehingga sesuai dengan teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dalam kajian teori.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023. Hal berarti sesuai dengan hipotesis penelitian sehingga sesuai dengan teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dalam kajian teori.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan populasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tahun 2013-2023. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian sehingga sesuai dengan teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dalam kajian teori.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka implikasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat perlu ditingkatkan karena Pendapatan Asli Daerah harus berada dibagian paling atas dari pendapatan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah seharusnya bisa menjadi tiang penyangga suatu daerah agar bisa hidup tanpa disokong pemerintah pusat.

2. Dana Perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah Sumatera Barat jelas sangat berpengaruh. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya dana perimbangan masih menjadi yang pertama dalam pelaksanaan program-program desentralisasi. Tentu daerah bisa refleksi diri mengapa masih saja mengandalkan uluran tangan pusat untuk menjalankan kebijakannya. Harus ada kesadaran agar tidak terus-terusan bergantung kepada pusat.
3. Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat tidak berpengaruh signifikan. Supaya PDRB memiliki pengaruh kepada Pengeluaran Pemerintah maka Pemerintah Sumatera Barat harus mampu menaikkan level investasi daerah dan PDRB per kapita masyarakat. Ketika banyak investasi yang masuk maka PDRB per kapita pun akan meningkat. Adanya perhatian seperti ini, dalam jangka panjang PDRB bisa secara signifikan mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Sumatera Barat.
4. Populasi terhadap Pengeluaran pemerintah Sumatera Barat tidak memiliki pengaruh signifikan. Supaya tingkat Populasi dapat berpengaruh ke pengeluaran pemerintah Sumatera Barat, perlu menyalurkan anggaran belanja yang tidak penting untuk peningkatan kualitas provinsi, seperti pengadaan pengadaan pelayanan publik yang berkualitas, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A. (2021). The Effect of Regional Original Revenue, Population and Economic Growth on Regional Spending. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 6(1), 38-50.
- Arioyuda, F., & Nugroho, S. B. M. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 132-141.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43-52.
- Fadillah, F., Erwita, F., Azzahra, F., Jambak, L. R., & Yolanda, R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 4(1), 1-12.
- Fatharani, M., Fadliyanti, L., & Agustiani, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-17.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Equity*, 22(2), 197-214.
- Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 187-197.
- Hamid, M., Siradjuddin, S., & Rusydi, B. U. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 4(2), 149-162.
- Handayani, L., Yulina, B., & Oktarida, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(5), 3078-3090.

- Hariyadi, M. D., & Pahlevi, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 327-336.
- Hidayat, N. H., Usu, I., Lamuda, I., & Karundeng, D. (2022). Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 342-360.
- Jolianis, J., Asrizal, A., & Wulandari, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). *Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 29795.
- Kurniawan, A., & Anggraini, E. D. (2024, December). The Influence Of Regional Original Revenue, Gross Regional Domestic Product, Revenue Sharing Funds, And Population On Regional Expenditure In The District/City Of Bengkulu Province In 2011-2023. In *Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA)* (Vol. 2, pp. 1629-1642).
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819-833.
- Murdiono, M. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kabupaten Enrekang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 78-88.
- Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2018). Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 171-185.
- Ramadhan, P. R., & Umiyati, E. (2021). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bungo. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 135-146.

- Roskaputri, F., & Heniwati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Berajah Journal*, 4(5), 1113-1126.
- Rudibdo, R., & Sasana, H. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Ekskaresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 215-226.
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 288-298.
- Sagala, M. S., & Malau, Y. N. (2023). Pengaruh Pdrb, Dana Bagi Hasil Dan Investasi Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 347-361.
- Saputri, H. M., & Pandoyo, P. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 3(2).
- Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. *Jurnal bisnis dan ekonomi*, 18(1).
- Septriani, S. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 884-894.
- Sianturi, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah:(Studi Empirik di Wilayah Provinsi Sumatera Utara). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 98-106.
- Wahyuningtyas, C. W. C., Widati, T. W. T., Batrisyia, D. B. D., & Anwar, S. A. S. (2022). Determinan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 2(02), 64-78.
- Yuliana, A. S., & Asmara, K. (2024). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 540-551.

Lampiran

Lampiran 1 Data Penelitian

KAB/KOTA	Tahun	PP	PAD	DP	PDRB	P
Padang	2023	2.578,20	658,74	1.637,67	49.316,19	924.687
Padang	2022	2.224,96	612,83	1.633,36	47.175,95	919.145
Padang	2021	2.211,84	538,93	1.571,90	45.226,64	913.448
Padang	2020	2.139,91	499,90	1.414,14	43.631,94	909.040
Padang	2019	3.081,74	546,11	1.524,37	44.456,79	950.871
Padang	2018	2.177,86	487,83	1.427,70	42.081,54	939.112
Padang	2017	2.077,46	548,65	1.360,29	39.675,73	927.011
Padang	2016	2.173,53	392,32	1.435,97	37.350,20	914.968
Padang	2015	1.948,38	370,41	1.169,08	35.180,55	902.413
Padang	2014	1.794,32	315,68	1.182,29	33.061,95	889.561
Padang	2013	1.619,58	238,87	1.142,68	31.054,50	876.670
Pariaman	2023	675,91	58,96	580,80	4.018,87	98.143
Pariaman	2022	606,42	35,77	565,41	3.835,25	96.719
Pariaman	2021	613,18	38,03	562,02	3.668,98	95.294
Pariaman	2020	645,14	32,96	487,43	3.544,66	94.224
Pariaman	2019	703,46	36,67	526,30	3.592,02	88.501
Pariaman	2018	634,78	32,21	509,93	3.411,29	87.626
Pariaman	2017	641,31	30,88	515,18	3.234,23	86.618
Pariaman	2016	588,63	29,68	533,63	3.062,31	85.691
Pariaman	2015	579,81	29,90	453,54	2.900,33	84.709
Pariaman	2014	505,92	26,68	441,29	2.741,54	83.610
Pariaman	2013	445,86	20,64	396,56	2.586,70	82.636
Bukittinggi	2023	833,95	160,75	590,51	6.869,40	123.013
Bukittinggi	2022	744,06	130,80	567,39	6.555,33	122.311

Bukittinggi	2021	650,05	91,79	593,76	6.263,04	121.588
Bukittinggi	2020	796,66	84,09	503,51	6.045,09	121.028
Bukittinggi	2019	717,09	111,90	552,06	6.152,08	130.773
Bukittinggi	2018	705,25	101,94	523,06	5.812,39	128.783
Bukittinggi	2017	590,69	102,02	516,23	5.483,40	126.804
Bukittinggi	2016	631,17	71,30	547,83	5.168,98	124.715
Bukittinggi	2015	579,10	66,03	449,87	4.874,25	122.621
Bukittinggi	2014	542,05	61,61	452,71	4.592,48	120.491
Bukittinggi	2013	504,11	55,20	408,81	4.324,42	118.260
Padang Panjang	2023	600,96	96,99	444,49	2.879,85	58.729
Padang Panjang	2022	545,21	85,71	450,76	2.746,84	57.850
Padang Panjang	2021	555,72	93,08	469,58	2.631,38	56.971
Padang Panjang	2020	544,01	79,43	440,67	2.543,40	56.311
Padang Panjang	2019	600,20	77,32	453,09	2.580,60	53.693
Padang Panjang	2018	613,49	79,75	442,11	2.444,77	52.994
Padang Panjang	2017	608,11	88,84	439,52	2.312,71	52.422
Padang Panjang	2016	548,86	70,36	461,72	2.186,01	51.712
Padang Panjang	2015	491,46	67,04	381,19	2.066,25	50.883
Padang Panjang	2014	406,62	51,60	378,74	1.951,00	50.208
Padang Panjang	2013	393,18	41,51	336,16	1.839,18	49.536
Payakumbuh	2023	771,23	112,07	600,20	5.002,70	145.468
Payakumbuh	2022	695,92	126,96	576,91	4.778,35	143.325
Payakumbuh	2021	677,73	90,29	568,34	4.572,19	141.184
Payakumbuh	2020	702,91	116,00	517,67	4.414,29	139.576
Payakumbuh	2019	805,94	104,07	609,59	4.488,21	135.573
Payakumbuh	2018	716,40	94,29	565,25	4.238,66	133.703
Payakumbuh	2017	694,22	116,60	596,08	3.997,85	131.819
Payakumbuh	2016	741,09	87,45	596,83	3.767,27	129.807

Payakumbuh	2015	694,21	100,65	508,63	3.551,23	127.826
Payakumbuh	2014	593,64	65,90	458,99	3.344,17	125.690
Payakumbuh	2013	512,84	54,18	420,60	3.140,91	123.654
Solok	2023	694,81	44,07	499,82	3.219,31	77.240
Solok	2022	594,26	39,17	503,85	3.071,58	75.850
Solok	2021	566,88	42,41	493,04	2.936,55	74.469
Solok	2020	508,13	40,55	440,04	2.835,75	73.438
Solok	2019	611,57	41,65	508,93	2.876,46	71.010
Solok	2018	648,55	40,74	481,48	2.726,71	69.776
Solok	2017	556,79	41,85	472,50	2.580,78	68.602
Solok	2016	548,99	42,12	508,17	2.440,13	67.307
Solok	2015	477,74	36,63	415,68	2.307,25	66.106
Solok	2014	452,97	29,52	400,41	2.177,37	64.819
Solok	2013	420,78	24,14	361,38	2.053,90	63.541
Sawahlunto	2023	685,57	70,09	536,31	3.072,35	67.131
Sawahlunto	2022	643,65	66,92	551,07	2.941,27	66.413
Sawahlunto	2021	599,19	51,48	538,15	2.829,35	65.687
Sawahlunto	2020	544,26	59,54	445,56	2.760,92	65.138
Sawahlunto	2019	622,47	57,17	495,14	2.796,54	62.524
Sawahlunto	2018	582,39	47,23	458,50	2.655,62	61.898
Sawahlunto	2017	587,09	63,08	467,16	2.517,15	61.398
Sawahlunto	2016	602,14	53,40	491,23	2.380,52	60.778
Sawahlunto	2015	550,00	52,27	418,03	2.251,78	60.186
Sawahlunto	2014	472,39	48,58	385,42	2.123,64	59.608
Sawahlunto	2013	415,97	37,10	345,48	2.001,85	58.972
Agam	2023	1.559,88	210,89	1.252,49	16.275,98	547.578
Agam	2022	1.437,21	156,67	1.232,36	15.572,21	540.905
Agam	2021	1.368,65	129,15	1.208,43	14.942,56	534.202

Agam	2020	1.254,15	107,16	1.040,11	14.409,17	529.138
Agam	2019	1.507,72	123,66	1.143,59	14.608,89	491.282
Agam	2018	1.387,56	99,68	1.092,07	13.942,52	487.914
Agam	2017	1.396,92	161,54	1.078,04	13.249,25	484.288
Agam	2016	1.354,82	102,60	1.107,76	12.567,02	480.722
Agam	2015	1.246,92	90,20	889,17	11.911,29	476.881
Agam	2014	1.095,89	79,42	832,48	11.287,82	472.995
Agam	2013	1.007,51	50,11	765,55	10.656,54	468.970
Pasaman	2023	1.144,33	108,39	952,26	6.876,87	311.744
Pasaman	2022	1.049,07	88,84	894,95	6.586,26	307.425
Pasaman	2021	1.015,11	89,39	901,89	6.327,97	303.103
Pasaman	2020	1.006,10	92,58	731,83	6.122,76	299.851
Pasaman	2019	1.012,30	98,60	784,98	6.176,33	281.211
Pasaman	2018	981,82	100,05	755,59	5.893,34	278.480
Pasaman	2017	999,00	142,75	767,06	5.614,28	275.728
Pasaman	2016	1.016,34	88,86	771,30	5.342,90	272.804
Pasaman	2015	855,04	79,68	650,21	5.085,32	269.883
Pasaman	2014	767,46	72,88	610,32	4.872,49	266.888
Pasaman	2013	689,76	46,02	544,33	4.559,63	263.838
Sijunjung	2023	1.083,33	104,88	864,97	7.468,60	243.308
Sijunjung	2022	947,08	95,11	839,72	7.163,43	240.317
Sijunjung	2021	907,89	91,77	838,31	6.892,61	237.313
Sijunjung	2020	896,56	90,74	661,69	6.683,02	235.045
Sijunjung	2019	1.000,51	83,91	737,77	6.757,04	237.376
Sijunjung	2018	958,14	79,06	700,52	6.446,99	233.810
Sijunjung	2017	896,04	107,92	710,61	6.135,76	230.104
Sijunjung	2016	932,03	76,83	725,80	5.829,04	226.300
Sijunjung	2015	799,43	65,01	618,27	5.537,78	222.512

Sijunjung	2014	708,29	54,26	600,24	5.239,42	218.588
Sijunjung	2013	639,41	38,10	541,68	4.941,94	214.560
Mentawai	2023	959,09	50,36	859,82	3.320,15	90.406
Mentawai	2022	787,29	49,66	784,69	3.191,30	89.401
Mentawai	2021	829,39	31,64	775,27	3.040,97	88.389
Mentawai	2020	821,60	34,91	651,90	2.956,01	87.623
Mentawai	2019	987,16	40,06	818,83	3.011,72	92.021
Mentawai	2018	900,58	45,36	776,85	2.875,66	90.373
Mentawai	2017	1.011,69	68,48	731,39	2.741,55	88.692
Mentawai	2016	990,80	41,95	787,06	2.608,13	86.981
Mentawai	2015	840,15	42,78	677,56	2.483,57	85.295
Mentawai	2014	646,39	33,75	633,61	2.360,75	83.603
Mentawai	2013	601,32	32,89	550,01	2.236,27	81.840
Solok Kabupaten	2023	1.274,73	88,12	1.132,44	11.008,01	401.371
Solok Kabupaten	2022	1.227,72	67,75	1.119,24	10.547,97	397.829
Solok Kabupaten	2021	1.160,52	75,86	1.083,96	10.114,58	394.237
Solok Kabupaten	2020	1.134,63	70,57	863,88	9.792,92	391.497
Solok Kabupaten	2019	1.247,72	74,60	980,74	9.905,60	373.414
Solok Kabupaten	2018	1.167,47	67,94	936,19	9.430,22	371.105
Solok Kabupaten	2017	1.176,60	113,27	911,90	8.964,87	368.691
Solok Kabupaten	2016	1.185,17	58,80	967,17	8.511,65	366.213
Solok Kabupaten	2015	1.052,45	55,61	802,97	8.082,58	363.684
Solok Kabupaten	2014	948,94	54,26	763,14	7.665,50	361.095
Solok Kabupaten	2013	826,30	31,49	681,30	7.245,94	358.383
Dharmasraya	2023	1.029,38	116,00	812,21	8.387,15	238.211
Dharmasraya	2022	939,37	100,82	786,49	8.037,79	234.713
Dharmasraya	2021	917,05	82,83	838,66	7.708,75	231.217
Dharmasraya	2020	985,75	82,88	731,50	7.454,97	228.591

Dharmasraya	2019	1.036,55	85,17	761,63	7.560,32	247.579
Dharmasraya	2018	931,60	84,12	708,97	7.204,47	241.571
Dharmasraya	2017	935,59	98,94	696,91	6.843,18	235.476
Dharmasraya	2016	881,88	56,45	740,80	6.490,29	229.313
Dharmasraya	2015	800,46	56,69	604,52	6.156,75	223.112
Dharmasraya	2014	681,32	52,81	543,76	5.821,73	216.928
Dharmasraya	2013	581,13	33,71	482,84	5.474,90	210.686
Pesisir Selatan	2023	1.693,21	150,23	1.474,83	10.608,29	523.402
Pesisir Selatan	2022	1.629,19	145,64	1.442,77	10.181,47	516.518
Pesisir Selatan	2021	1.591,68	145,03	1.400,27	9.788,46	509.618
Pesisir Selatan	2020	1.614,56	132,75	1.105,65	9.470,78	504.418
Pesisir Selatan	2019	1.693,64	134,80	1.213,73	9.576,66	463.923
Pesisir Selatan	2018	1.569,02	123,91	1.120,39	9.139,97	460.716
Pesisir Selatan	2017	1.507,59	176,90	1.109,25	8.678,05	457.285
Pesisir Selatan	2016	1.500,65	108,92	1.138,07	8.232,59	453.822
Pesisir Selatan	2015	1.359,85	107,99	931,06	7.816,21	450.186
Pesisir Selatan	2014	1.143,20	86,70	885,52	7.392,54	446.479
Pesisir Selatan	2013	984,96	47,70	805,70	6.986,97	442.681
Tanah Datar	2023	1.299,97	150,89	1.097,38	10.757,91	378.797
Tanah Datar	2022	1.186,93	144,52	1.025,17	10.300,93	376.276
Tanah Datar	2021	1.207,54	121,38	1.077,61	9.889,46	373.693
Tanah Datar	2020	1.185,20	122,25	881,63	9.575,90	371.704
Tanah Datar	2019	1.350,36	129,79	984,49	9.684,47	348.219
Tanah Datar	2018	1.238,10	115,91	944,91	9.224,52	347.407
Tanah Datar	2017	1.218,83	172,81	928,98	8.782,10	346.578
Tanah Datar	2016	1.249,50	118,97	963,49	8.355,07	345.706
Tanah Datar	2015	1.106,20	112,07	766,63	7.955,07	344.828
Tanah Datar	2014	971,01	99,69	728,27	7.552,75	343.875

Tanah Datar	2013	856,38	63,84	658,11	7.139,45	342.864
Pasaman Barat	2023	1.216,19	127,04	981,36	12.684,89	488.639
Pasaman Barat	2022	1.138,87	116,29	1.033,43	12.158,62	442.479
Pasaman Barat	2021	1.084,34	136,99	959,73	11.675,98	436.313
Pasaman Barat	2020	1.118,85	108,86	824,45	11.258,35	431.672
Pasaman Barat	2019	1.194,09	104,07	919,58	11.411,83	443.722
Pasaman Barat	2018	1.169,52	158,87	887,12	10.925,63	435.612
Pasaman Barat	2017	1.021,29	158,92	835,17	10.384,39	427.295
Pasaman Barat	2016	1.060,38	91,17	871,53	9.857,62	418.785
Pasaman Barat	2015	909,85	69,13	735,45	9.357,82	410.307
Pasaman Barat	2014	835,38	69,93	683,03	8.853,52	401.624
Pasaman Barat	2013	713,16	36,83	619,33	8.348,90	392.907
Solok Selatan	2023	889,95	88,88	739,71	4.414,12	192.481
Solok Selatan	2022	900,54	92,11	784,71	4.221,15	188.649
Solok Selatan	2021	826,14	80,46	741,09	4.058,51	184.854
Solok Selatan	2020	856,24	76,86	652,00	3.928,03	182.027
Solok Selatan	2019	867,44	67,84	695,37	3.977,41	171.075
Solok Selatan	2018	788,84	60,55	636,22	3.793,19	168.411
Solok Selatan	2017	822,92	75,59	696,91	3.612,64	165.603
Solok Selatan	2016	737,80	51,13	620,29	3.435,70	162.724
Solok Selatan	2015	703,40	38,53	569,88	3.267,81	159.796
Solok Selatan	2014	595,55	32,34	509,85	3.101,95	156.901
Solok Selatan	2013	530,58	22,22	426,42	2.929,01	153.943
Lima Puluh Kota	2023	1.285,01	102,02	1.136,60	12.430,83	391.054
Lima Puluh Kota	2022	1.230,59	82,96	1.128,04	11.890,13	388.375
Lima Puluh Kota	2021	1.266,37	79,85	1.164,18	11.430,81	385.634
Lima Puluh Kota	2020	1.217,12	77,43	948,97	11.062,32	383.525
Lima Puluh Kota	2019	1.362,12	85,17	1.061,02	11.192,42	382.817

Lima Puluh Kota	2018	1.244,91	73,44	997,62	10.653,26	379.514
Lima Puluh Kota	2017	1.258,25	119,77	992,05	10.123,65	376.072
Lima Puluh Kota	2016	1.244,70	68,06	1.010,10	9.611,26	372.568
Lima Puluh Kota	2015	1.088,65	62,93	824,56	9.125,38	368.985
Lima Puluh Kota	2014	986,35	52,83	780,78	8.640,82	365.389
Lima Puluh Kota	2013	881,55	33,10	709,85	8.152,91	361.645
Padang Pariaman	2023	1.528,33	147,81	1.233,61	13.740,82	439.171
Padang Pariaman	2022	1.314,91	126,24	1.191,49	13.029,17	436.129
Padang Pariaman	2021	1.326,68	116,90	1.179,72	12.195,75	433.018
Padang Pariaman	2020	1.343,68	105,93	973,69	11.939,48	430.626
Padang Pariaman	2019	1.444,56	101,61	1.139,64	13.334,92	415.613
Padang Pariaman	2018	1.409,35	84,47	1.087,05	13.021,89	413.272
Padang Pariaman	2017	1.414,77	141,31	1.059,56	12.350,19	411.003
Padang Pariaman	2016	1.336,32	72,86	1.128,37	11.697,04	408.722
Padang Pariaman	2015	1.165,72	73,00	865,98	11.085,45	476.881
Padang Pariaman	2014	1.045,82	62,97	806,67	10.444,26	472.995
Padang Pariaman	2013	1.107,30	56,52	809,71	9.848,85	400.890

Lampiran 2 Common Effect Model

Dependent Variable: PP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/19/25 Time: 06:16
 Sample: 2013 2023
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68011596	22173286	3.067276	0.0025
PAD	1.004059	0.196085	5.120524	0.0000
DP	0.902371	0.046052	19.59450	0.0000
PDRB	-1.121122	3.455773	-0.324420	0.7460
P	442.1024	104.4413	4.233021	0.0000
Root MSE	86300551	R-squared	0.958470	
Mean dependent var	9.90E+08	Adjusted R-squared	0.957655	
S.D. dependent var	4.24E+08	S.E. of regression	87351754	
Akaike info criterion	39.43242	Sum squared resid	1.56E+18	
Schwarz criterion	39.51238	Log likelihood	-4115.688	
Hannan-Quinn criter.	39.46475	F-statistic	1177.015	
Durbin-Watson stat	1.580241	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 3 Fixed Effect Model

Dependent Variable: PP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/19/25 Time: 06:20
 Sample: 2013 2023
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.83E+08	1.18E+08	1.546141	0.1238
PAD	1.210483	0.331444	3.652146	0.0003
DP	0.709885	0.080243	8.846645	0.0000
PDRB	3.028896	8.609849	0.351794	0.7254
P	369.1230	505.4347	0.730308	0.4661

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	80301308	R-squared	0.964043
Mean dependent var	9.90E+08	Adjusted R-squared	0.959790
S.D. dependent var	4.24E+08	S.E. of regression	85121504
Akaike info criterion	39.46057	Sum squared resid	1.35E+18
Schwarz criterion	39.82838	Log likelihood	-4100.629
Hannan-Quinn criter.	39.60928	F-statistic	226.6742
Durbin-Watson stat	1.769710	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4 Random Effect Model

Dependent Variable: PP
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/19/25 Time: 06:21
 Sample: 2013 2023
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 209
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68011596	21607161	3.147641	0.0019
PAD	1.004059	0.191079	5.254686	0.0000
DP	0.902371	0.044876	20.10789	0.0000
PDRB	-1.121122	3.367540	-0.332920	0.7395
P	442.1024	101.7748	4.343930	0.0000

Lampiran 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.601664	(18,186)	0.0631
Cross-section Chi-square	30.116932	18	0.0363

Lampiran 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.125389	4	0.0001